

KORAN
DIGITAL

PERTAMA
& GRATIS

KORAN SULSEL

TERPERCAYA & TERDEPAN

.COM

EDISI SELASA

9 SEPTEMBER 2025

TUMPAHAN MINYAK VALE ANCAM SAWAH LUWU TIMUR PULUHAN TAHUN



LOSARI DITATA ULANG,
PEDAGANG TETAP DAPAT TEMPAT
BACA HALAMAN ... 3



TUMPAHAN MINYAK VALE ANCAM SAWAH LUWU TIMUR PULUHAN TAHUN

MAKASSAR – Tumpahan minyak milik PT Vale Indonesia (PTVI) di persawahan warga Luwu Timur, Sulawesi Selatan, berpotensi merusak struktur tanah hingga puluhan tahun jika tidak ditangani serius. Peringatan ini disampaikan pakar Fakultas Pertanian dan Bioremediasi Lahan Tambang Universitas Muslim Indonesia (UMI), Dr Saida, di Makassar, Senin (8/9).

Menurutnya, tumpahan minyak tergolong limbah B3 yang mengandung zat berbahaya dan dapat merusak lingkungan secara luas, baik tanah, air, maupun udara. "Sifat kimianya terkait ke-

suburan tanah, sifat biologinya berpengaruh pada organisme di dalam tanah yang bisa terbunuh, dan sifat fisiknya membuat struktur tanah lebih keras, tidak lagi gembur," jelasnya.

Saida menambahkan, dampak lain adalah berkurangnya daya ikat tanah terhadap air (water holding capacity). "Permukaan tanah yang diselimuti minyak akan sulit menyerap air. Jika tidak ditangani, ini bisa berlangsung hingga puluhan tahun," ujarnya.

Untuk mempercepat pemulihan, ia merekomendasikan sejumlah langkah, antara lain melakukan pengairan rutin di

sawah terdampak lalu membuang airnya, serta menambahkan bahan organik seperti pupuk kandang dan kompos guna menetralkan sisa minyak. Ia juga menekankan perlunya pendekatan biologis dengan mikroorganisme yang mampu mendegradasi senyawa hidrokarbon.

"Minyak adalah senyawa hidrokarbon, dan ada mikroba yang bisa mendegradasi itu. Menebarkan mikroba ke persawahan bisa mempercepat pemulihan dibandingkan cara fisik atau kimia," tegas Wakil Dekan II Fakultas Pertanian UMI tersebut. (ant/KS)

LOSARI DITATA ULANG, PEDAGANG TETAP DAPAT TEMPAT

MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menegaskan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Anjungan Pantai Losari bukan bentuk larangan, melainkan upaya penataan. Pemkot juga sudah menyiapkan lokasi baru agar para pedagang tetap bisa berjualan tanpa mengganggu fungsi ruang publik.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Hendra Hakamuddin, mengatakan keresahan sejumlah pedagang yang merasa dilarang berjualan tidak benar. "Pemerintah tidak pernah melarang. Pertanyaannya, apakah badan jalan memang tempat untuk berjualan? Apakah anjungan diperuntukkan untuk jualan? Semua harus sesuai aturan," ujarnya, Senin (8/9).

Menurut Hendra, langkah penertiban dilakukan agar kawasan Pantai Losari tetap nyaman bagi pengunjung. "Ini hanya penataan. Kami bukan melarang pedagang, tetapi menata ulang agar

tidak semrawut dan tidak mengganggu orang lain," tegasnya. Ia menambahkan Pemkot Makassar telah menyiapkan lahan alternatif bagi pedagang yang sebelumnya berjualan di kawasan anjungan, sehingga masyarakat masih bisa mencari nafkah secara layak tanpa harus melanggar aturan.

Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban dan Ketenteraman. Pasal 23 huruf A menegaskan bahwa setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan aktivitas di atas jalan, trotoar, taman, maupun jalur hijau yang tidak se-

suai dengan peruntukannya. Aturan tersebut menjadi dasar kuat Pemkot Makassar dalam menata kembali aktivitas perdagangan di kawasan Anjungan Pantai Losari yang belakangan menuai protes sebagian warga.

Hendra menegaskan penataan ini penting agar Anjungan Pantai Losari tetap menjadi ikon kebanggaan warga Makassar dan daya tarik utama wisatawan. "Orang datang ke Makassar pasti ke Pantai Losari. Kalau ke Losari pasti ke anjungan. Karena itu, wajah Losari harus semakin indah," ucapnya. (ant/KS)



Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar Hendra Hakamuddin saat membahas mengenai penataan pedagang kaki lima di kawasan Pantai Losari Makassar, Senin (8/9/2025). ANTARA/HO-Pemkot Makassar

SULSEL DUKUNG PENUH RUU KEAMANAN DAN KETAHANAN SIBER

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber yang digagas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Regulasi ini dipandang sebagai fondasi penting dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber sekaligus memperkuat transformasi digital di daerah.

Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulsel, Andi Bakti, menegaskan hadirnya RUU tersebut sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. "Transformasi digital membawa banyak manfaat, mulai dari efisiensi layanan publik, pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, ancaman siber kini semakin kompleks, dari pencurian

data, serangan malware, hingga penyalahgunaan informasi yang bisa mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, bahkan keamanan nasional," ujarnya pada forum uji publik RUU Keamanan dan Ketahanan Siber di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (8/9).

Ia menilai, regulasi ini akan menjadi kerangka hukum komprehensif sekaligus pedoman kolaborasi lintas sektor. "Bagi kami di Sulawesi Selatan, regulasi ini adalah fondasi penting untuk mendukung transformasi digital, penguatan layanan publik berbasis teknologi, serta perlindungan data dan infrastruktur penting daerah," jelasnya.

Dukungan serupa juga datang dari Deputy Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Marsda R. Tjahjo Kurniawan. Ia mengingatkan bahwa

berbagai insiden keamanan siber pada 2024 sempat mengganggu layanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat. "Kita masih ingat beberapa kejadian yang cukup mengganggu. Insiden itu menurunkan kepercayaan publik terhadap keamanan siber dan sandi di Indonesia. Untuk itu, penguatan perlindungan data harus segera dilakukan," tegasnya.

Menurutnya, persandian bukan sekadar istilah teknis, melainkan sistem nyata yang menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi di era digital. "Perancangan undang-undang ini menjadi langkah bagaimana negara hadir melindungi masyarakat. Pemerintah maupun swasta harus bersama-sama memastikan ruang digital aman, agar masyarakat bisa beraktivitas dengan baik," tandasnya. (ant/KS)





SULSEL TARGETKAN PENDAPATAN RP 10,4 TRILIUN DALAM APBD PERUBAHAN 2025

MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menegaskan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan mencapai Rp10,4 triliun. Angka tersebut dipaparkan pada rapat paripurna DPRD Sulsel di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMK), Makassar, Senin (8/9).

Proyeksi itu terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp5,57 triliun, pendapatan transfer Rp4,82 triliun, serta lain-lain pendapatan sah Rp7,3 miliar. "Hal ini mengacu pada kesepakatan perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepaka-

ti bersama beberapa waktu lalu," ujarnya di hadapan 65 anggota DPRD Sulsel.

Gubernur menyebut optimalisasi PAD menjadi fokus, terutama sektor pajak daerah melalui kerja sama swakelola tipe II. Skema ini diarahkan pada percepatan pendataan dan penagihan kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) untuk menekan tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa.

Dalam Ranperda APBD Perubahan 2025, belanja daerah ditetapkan Rp10,33 triliun dengan rincian belanja operasi Rp6,39 triliun, belanja modal Rp1,51 triliun, belanja tidak terduga Rp49,5 miliar, dan belanja transfer Rp2,37

triliun. Untuk pembiayaan daerah, terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa) senilai Rp83,06 miliar.

Andi Sudirman menekankan bahwa arah kebijakan fiskal Sulsel tetap diselaraskan dengan pembangunan nasional. Langkah ini merujuk pada Astacita menuju Indonesia Emas 2045 yang meliputi agenda strategis mulai dari sinergi pusat-daerah, stabilitas politik, ketahanan pangan dan energi, hilirisasi industri, penyediaan rumah layak huni, hingga pemenuhan gizi masyarakat.

"Melalui perubahan APBD 2025, Pemprov Sulsel tidak hanya menjaga kesinambungan pembangunan, tetapi juga memastikan Sulsel tetap menjadi motor penggerak pencapaian Indonesia Emas 2045," tandasnya. (ant/KS)

PEMKOT MAKASSAR GANDENG STIBA PERKUAT URBAN FARMING DAN BAHASA ARAB DI SEKOLAH

MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memperkuat kerja sama dengan Institut Agama Islam (IAI) STIBA Makassar melalui program pengembangan pertanian perkotaan (urban farming), pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta penguatan pendidikan bahasa Arab di sekolah. Kolaborasi ini ditegaskan lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Senin (8/9).

Munafri menilai peran lembaga pendidikan seperti STIBA penting dalam membentuk generasi muda yang berkarakter dan bertakwa. “Sekolah seperti STIBA hadir sebagai tameng untuk mengembalikan marwah generasi muda agar tetap bertakwa kepada Allah SWT. Saya

berharap seluruh ikhtiar ini menjadi amal jariyah bagi kita semua,” ujarnya.

Ia mengapresiasi sistem pendidikan di STIBA yang mewajibkan mahasiswanya mengabdikan selama satu tahun ke masyarakat sebelum menyelesaikan studi. Menurutnya, pengalaman ini menjadi bekal penting dalam menanamkan nilai pengabdian sekaligus meningkatkan literasi masyarakat. Munafri pun berpesan agar para alumni Tebar Da’i Nusantara mampu menjaga persatuan serta menjadi teladan dalam menciptakan suasana kondusif, khususnya di Makassar.

Selain fokus pada penguatan keagamaan, Munafri juga menekankan pentingnya pendidikan bahasa Arab bagi generasi

muda. Ia menargetkan bahasa Arab dapat masuk ke kurikulum sekolah menengah pertama. “Kita ingin anak-anak dibekali pendidikan bahasa Arab. Hampir semua negara Islam, khususnya di Timur Tengah, membutuhkan tenaga kerja dan pelajar dari luar. Namun kendalanya ada di bahasa. Karena itu, saya ingin bahasa Arab masuk di tingkat menengah,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mendorong STIBA menjadi kampus percontohan pengelolaan sampah berkelanjutan yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga bernilai ekonomis. “Saya ingin STIBA tidak hanya mengelola sampah, tapi juga mampu menjadikannya bernilai ekonomi bagi masyarakat,” tandas Munafri. (ant/KS)





Penyaluran bantuan bibit rumput laut di daerah pesisir Kabupaten Luwu oleh DKP Sulsel yang dilakukan secara bertahap.

SULSEL GENJOT EKONOMI BIRU, 2.000 PAKET BIBIT RUMPUT LAUT DIGELONTORKAN DI LUWU RAYA

MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menandatangani langkah serius mendorong pertumbuhan ekonomi biru berkelanjutan. Tahun 2025 ini, ribuan paket bantuan bibit rumput laut beserta sarana budidaya disalurkan bagi para petani pembudidaya di kawasan pesisir Luwu Raya, meliputi Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel, Muhammad Ilyas, menegaskan program ini menjadi strategi menjaga stabilitas produksi sekaligus meningkatkan daya saing. "Ini upaya Pemprov Sulsel untuk mendukung para pembudidaya, mempertahankan volume produksi, dan sebisa mungkin meningkatkannya," ujarnya di

Makassar, Minggu (7/9).

Pemprov Sulsel melalui DKP dengan dukungan DPRD Sulsel menyiapkan 2.000 paket sarana prasarana budidaya rumput laut. Tiap paket berisi 300 kilogram bibit dan 250 pelampung ramah lingkungan. Pada tahap pertama, penyaluran difokuskan di Luwu Raya.

Kepala Bidang Budidaya dan Daya Saing Produk DKP Sulsel, Suhartono, menjelaskan sebanyak 471 petani dari 41 kelompok akan menerima total 141,3 ton bibit dan lebih dari 117.750 pelampung. Produksi rumput laut Sulsel sendiri pada 2024 mencapai empat juta ton basah, menjadikan provinsi ini salah satu lumbung rumput laut nasional.

Risaldi, petani dari Kelompok Passampa Katonik, Kabupaten

Luwu, mengaku optimistis bantuan tersebut akan mendongkrak hasil panennya tahun ini. "Kami sangat terbantu, dengan program ini kami bisa lebih semangat meningkatkan produksi," katanya.

Sementara itu, anggota DPRD Sulsel Rusli Sunali menegaskan pihaknya akan mengawal program ini agar tepat sasaran. "Tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani rumput laut. Karena itu, harus dijalankan konsisten, tepat sasaran, dan berkesinambungan," tegasnya.

Dengan langkah ini, Pemprov Sulsel menargetkan Luwu Raya tumbuh sebagai sentra produksi rumput laut berkelanjutan di Indonesia, yang bukan hanya produktif tetapi juga ramah lingkungan. (ant/KS)

GRATIS
TANPA IURAN

E-PAPER

koranNusantara

EDISI SELASA
9 SEP 2025

www.koranusantara.com



ISTANA BANTAH RESHUFFLE KABINET BUKAN UNTUK HAPUS MENTERI ERA JOKOWI

BACA HALAMAN 2



**POLRES TANGSEL TETAPKAN
11 TERSANGKA PENJARAHAAN
RUMAH SRI MULYANI**



Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025). ANTARA/Andi Firdaus

ISTANA BANTAH RESHUFFLE KABINET BUKAN UNTUK HAPUS MENTERI ERA JOKOWI

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah perombakan susunan menteri (reshuffle) di Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin ini bertujuan menghapus para menteri di era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi tersebut menanggapi pertanyaan awak media perihal para menteri yang dilantik sejak era pemerintahan Jokowi yang diberhentikan pada reshuffle atau perombakan susunan kabinet.

"Enggak ada, enggak ada," kata Prasetyo Hadi membantah isu tersebut dan menjawab pertanyaan awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).

Pras, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa para menteri

yang dilantik pada Senin ini merupakan putra terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Pemilihan menteri tersebut juga merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.

"Enggak ada orang siapa, orang siapa, adalah orang itu putra terbaik bangsa Indonesia," kata Pras melanjutkan.

Adapun Presiden Prabowo Subianto memberhentikan para menteri di Kabinet Merah Putih, yakni Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Dito Ariotedjo dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Kedua menteri tersebut dilantik sebagai menteri sejak periode kedua pemerintahan Presiden Ke-7 RI Jokowi.

Sri Mulyani dan Dito Ariotedjo terpilih kembali menjabat posisi yang sama pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan

dilantik pada 21 Oktober 2024 saat Kabinet Merah Putih baru terbentuk saat itu.

Presiden Prabowo, pada Senin, melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Sementara itu, pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo belum disebutkan.

Presiden juga melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi serta Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya, Dahnil Azhar.

Untuk posisi Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Presiden turut mengangkat Muktaruddin.

Seluruh prosesi pelantikan dan pengangkatan pejabat itu didasari atas Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029. (ANT/KN)



Kapolres Tangsel, AKBP Victor Inkiriwang. ANTARA/HO-Polres Tangsel.

POLRES TANGSEL TETAPKAN 11 TERSANGKA PENJARAHAN RUMAH SRI MULYANI

TANGERANG SELATAN - Kepolisian Resor (Polres) Tangerang Selatan (Tangsel), Polda Metro Jaya, menetapkan sebanyak 11 orang sebagai tersangka dalam kasus penjarahan rumah Sri Mulyani di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten.

"Kita sudah menetapkan 11 orang tersangka dugaan pencurian dengan pemberatan dan perusakan yang terjadi di kediaman Ibu Sri Mulyani," kata Kapolres Tangsel, AKBP Victor Inkiriwang di Tangerang, Senin (8/9/2025).

Ia menyebut, dari ke 11 orang tersangka ini diketahui merupakan warga Tangerang Selatan dan Jakarta. Dimana, lanjutnya, saat ini mereka telah dilakukan penahanan di Mapolres setempat.

"Sudah kita lakukan penahanan. Mereka sudah dewasa yang berasal dari Tangerang Selatan serta dari Jakarta," ucapnya.

Victor menegaskan, dalam hal

ini pihaknya ditugaskan untuk fokus terhadap penanganan kasus penjarahan di kediaman Sri Mulyani. Sedangkan terkait kasus penjarahan rumah Nafa Urbach telah ditangani langsung oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya.

"Barang bukti nanti kami akan sampaikan, karena kami sedang kembangkan. Yang jelas 11 orang tersangka ini adalah pelaku aktif, mereka ini memang sudah berniat untuk melakukan kejahatan dan terlibat aktif dalam tindak pidana di rumah Ibu Sri Mulyani," jelasnya.

Dia juga menambahkan, tim penyidik kini masih mencari tersangka lainnya terkait kasus pencurian di rumah Sri Mulyani tersebut melalui dengan pemeriksaan atas 11 pelaku yang telah ditahan.

"Tidak hanya berhenti yang 11 orang tersangka ini, kita masih kembangkan dan kita akan melakukan pengembangan secara maksimal," kata dia.

Sebelumnya, rumah yang disebut-sebut sebagai kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan, dijarah oleh orang-orang tak dikenal pada Minggu (31/8) dini hari.

Berdasarkan kesaksian sejumlah warga, penjarahan itu berlangsung dalam dua gelombang.

"Gelombang pertama sekitar jam 1 (dini hari), gelombang kedua terjadi sekitar jam 3 (dini hari)," kata Joko Sutrisno, staf pengamanan di rumah Sri Mulyani.

Dari keterangan Joko dan warga lain, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa di rumah itu. Pun tak ada kendaraan roda empat yang dirusak karena memang sedang tidak ada di sana.

Menurut para saksi mata, penjarahan gelombang kedua adalah yang paling mengerikan karena melibatkan ratusan orang, bahkan mungkin seribuan orang. (ANT/KN)



Kamera wartawan merekam layar digital yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (1/9/2025). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi dibuka melemah 210,39 poin atau 2,69 persen ke posisi 7.620,10. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wpa. (ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)

SRI MULYANI DIGANTI, IHSG MELEMAH 1,28 PERSEN USAI RESHUFFLE KABINET

JAKARTA - Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengungkapkan perombakan kabinet, termasuk pergantian posisi menteri keuangan (Menkeu), menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pasar modal Indonesia melemah signifikan sebesar 1,28 persen ke posisi 7.766,84.

"Dinamika pergantian Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan menyebabkan IHSG langsung berada di zona merah dari zona positif," ujar Nafan saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Senin (8/9/2025).

IHSG tercatat melemah 100,49 poin atau 1,28 persen ke posisi

7.766,84 pada penutupan perdagangan Senin, dengan frekuensi perdagangan tercatat 2.231.184 kali dan volume perdagangan sebanyak 36,65 miliar dan nilai transaksi senilai Rp20,15 triliun.

Padahal, selama perdagangan hari hingga pukul 15.30 WIB, IHSG terpantau di zona positif dengan penutupan sesi I tercatat menguat 0,58 persen atau 45,60 persen ke posisi 7.912,94 persen.

"Dinamika pergantian Sri Mulyani dari jabatan Kemenkeu membuat pasar melakukan aksi jual," ujar Nafan.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle di

lima kementerian strategis, serta melantik satu pejabat instansi baru di Kabinet Merah Putih.

Mensesneg Prasetyo menyebut reshuffle terjadi di Kemenko Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan olahraga.

"Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi, yang dilakukan terus menerus oleh Presiden, maka pada sore ini sekaligus Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian," katanya. (ANT/KN)



Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo (kiri) berbincang dengan Wamenpora Taufik Hidayat (kanan) saat berjalan keluar dari Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Jakarta, Senin (8/9/2025). Dito Ariotedjo mendatangi Kantor Kemenpora untuk mengambil barang pribadi dan bertemu dengan sejumlah pejabat kementerian usai diberhentikan dari jabatan Menpora oleh Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/bar (ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S)

WAMENPORA TAUFIK HIDAYAT PASTIKAN PROGRAM KEMENPORA TETAP JALAN

JAKARTA - Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat menegaskan seluruh program Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tetap berjalan meskipun posisi Menteri definitif masih menunggu penunjukan Presiden Prabowo Subianto.

"Besok kami ikuti seperti biasa, apa yang sudah dijadwalkan kami jalan terus. Kami ikut arahan Pak Presiden. Jadi jangan sampai apa yang sudah dilegasiin Pak Dito (Ariotedjo) tidak dijalankan," kata Taufik kepada wartawan di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (8/9/2025) malam.

Taufik menambahkan, seluruh kegiatan kepemudaan dan olahraga akan tetap dilaksanakan sesuai agenda, termasuk peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-42 di Cibubur, Jakarta Timur, pada Selasa (9/9/2025).

"Yang pasti besok ada, Haornas ada, akan jalan juga. Siapa pun nanti Menporanya, kami belum tahu, tapi olahraga harus tetap steady," ujarnya.

la menyebut hingga saat ini

belum ada informasi mengenai siapa pengganti Menpora Dito Ariotedjo atau pun kapan pelantikan akan dilakukan.

Namun, ia menegaskan program yang sudah berjalan akan terus dilanjutkan, dengan perbaikan pada bagian yang masih kurang.

"Harapannya Menpora baru nanti bisa lebih baik lagi. Apa yang sudah baik kita teruskan, yang kurang kita perbaiki," kata Taufik.

Terkait sejumlah isu yang beredar termasuk Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 14 Tahun 2024, Taufik menyebut keputusan akhir akan ditentukan setelah adanya Menpora definitif.

"Nanti setelah ada Menteri yang baru, kami diskusi lagi bagaimana ke depannya," ujarnya menambahkan.

Dalam reshuffle Kabinet Merah Putih Senin, Dito termasuk dalam daftar menteri yang diganti. Prabowo kemudian melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta.

Mereka adalah Purbaya Yudhi

Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah beserta Wakilnya Dahnil Azhar, serta Muktaruddin sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024–2029.

Hingga kini, pengganti Dito Ariotedjo sebagai Menpora belum diumumkan, sementara perayaan puncak Haornas dijadwalkan berlangsung besok.

Dito sebelumnya ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menpora pada 3 April 2023 menggantikan Zainudin Amali. Ia kemudian kembali dipercaya Presiden Prabowo untuk melanjutkan tugas dalam Kabinet Merah Putih sejak 20 Oktober 2024. (ANT/KN)



Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan selepas acara pelantikan dirinya dan beberapa menteri, wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). ANTARA/Andi Firdaus.

MENKEU PURBAYA: TIDAK PERLU PUNGUTAN PAJAK BARU

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai tidak perlu ada memberlakukan pungutan pajak yang baru untuk masyarakat mengingat sistem perpajakan yang saat ini digunakan cukup efektif untuk menghimpun pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara.

"Menurut saya pribadi, selama ini gak usah (ada pungutan pajak baru)," kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas dilantik sebagai menteri keuangan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Purbaya menjelaskan salah satu prioritasnya saat ini meningkatkan pertumbuhan, karena itu juga berkorelasi positif dengan pendapatan negara. "Dengan sistem yang ada pun, kalau pertumbuhannya bagus, anggap tax to GDP ratio-nya konstan, income-nya kenceng juga," sambung Purbaya.

Kebijakan Purbaya sejalan dengan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati, yang saat rapat kerja dengan DPD RI secara virtual, Selasa (2/9) minggu lalu, menyebutkan pemerintah tidak memberlakukan pungutan pajak baru

pada tahun ini, dan pada tahun 2026. Keputusan itu diambil oleh Sri meskipun target pendapatan negara naik sebesar 9,8 persen.

"Dari sisi pendapatan negara, karena kebutuhan negara dan bangsa begitu banyak, maka pendapatan negara terus ditingkatkan tanpa ada kebijakan-kebijakan baru," kata Sri Mulyani saat rapat kerja tersebut.

Dia melanjutkan pemerintah menempuh strategi lain untuk mencapai target penerimaan negara, di antaranya dengan memperbaiki sistem perpajakan, kemudian meningkatkan kepatuhan. Sri Mulyani juga meminta para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak perlu khawatir, karena UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta tidak perlu membayar pajak penghasilan (PPh), sementara usaha yang omzetnya Rp500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar kena PPh final 0,5 persen.

Di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025) sore, Presiden Prabowo memberhentikan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan, dan melantik Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggantikan Sri. Selepas dilantik, Purbaya menye-

but beberapa prioritasnya, antara lain mengatasi perlambatan ekonomi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Purbaya yakin dalam waktu 2 bulan sampai dengan 3 bulan ke depan, masalah perlambatan ekonomi itu dapat diatasi. "Kalau saya lihat masih ada pengelolaan uang yang masih belum optimal, kita akan perbaiki itu. Jadi, walaupun anggarannya, misalnya terserap, kita akan pastikan danya tidak mengganggu sistem perbankan kita. Itu yang kita kerjakan nanti. Jadi tidak usah khawatir," kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas pelantikan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada dirinya setelah pelantikan.

"Pokoknya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik, sejahterakan rakyat semaksimal mungkin. Kita gak boleh gagal dengan program-program yang menyejahterakan rakyat kita. Itu yang akan saya kerjakan," ujar Purbaya. (ANT/KN)



Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (ketiga dari kiri), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (keempat dari kanan), dan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan (ketiga dari kanan) menghadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional, di Jakarta, Senin (8/9/2025). ANTARA/Uyu Septiyati Liman

BPJPH AKAN AUDIT PABRIK NAMPAN MBG DI CHINA

JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyatakan pada pekan ini pihaknya berencana mengunjungi pabrik di China yang memproduksi nampaan makanan yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyampaikan upaya tersebut dilakukan untuk memeriksa kesesuaian prosedur produksi peralatan makan tersebut dengan prinsip halal, mengingat adanya isu kontaminasi minyak babi pada produk tersebut.

"Mudah-mudahan dalam minggu ini kami akan berangkat ke China karena kami tidak melayani (komentar berdasarkan) isu, tidak melayani (komentar berdasarkan) berita-berita yang hoaks. Kami harus menyaksikan lebih dulu (proses produksinya). Kami harus audit lebih dulu semuanya," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin (8/9/2025).

Haikal mengakui bahwa sebagian nampaan makanan yang digunakan dalam program MBG diimpor dari China, karena produsen lokal tidak mampu memenuhi kekurangan 70 juta nampaan.

Meskipun demikian, ia memastikan pihaknya berkomitmen untuk memaksimalkan penggunaan produk-produk dalam negeri.

"Karena kan kebutuhan lokal ini tidak sanggup memenuhi, sehingga sebagian impor. Kami memang sama (dengan kementerian dan lembaga lainnya), sepakat (dengan slogan) 'Cintailah produk-produk Indonesia', itu sepakat. Namun, kalau ternyata kebutuhannya belum memenuhi, dengan sangat terpaksa juga impor," kata Haikal Hasan pula.

Sebelumnya, beredar di media sosial laporan dari Indonesia Business Post yang melakukan

investigasi di wilayah Chaoshan, bagian timur Provinsi Guangdong, China, yang diduga merupakan importir ompreng untuk program MBG di Indonesia.

Dalam laporan tersebut tim Indonesia Business Post melaporkan penemuan 30-40 pabrik yang memproduksi ompreng makanan untuk pasar global, termasuk salah satunya diduga untuk program MBG di Indonesia.

Laporan tersebut mengklaim penemuan dugaan praktik pemalsuan label "Made in Indonesia" dan logo SNI pada ompreng yang sebenarnya diproduksi di China, penggunaan ompreng tipe 201 yang diduga mengandung mangan (logam berwarna putih keabu-abuan) yang tinggi dan tidak cocok untuk makanan asam.

Selain itu, ditemukan indikasi adanya penggunaan minyak babi atau lard dalam ompreng yang diproduksi. (ANT/KN)



Hotman Paris Hutapea (tengah), kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, berbicara dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025). ANTARA/Nadia Putri Rahmani.

HOTMAN PARIS: PRAPERADILAN NADIEM MAKARIM MASIH DIPERTIMBANGKAN

JAKARTA - Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum Nadiem Makarim, mengatakan bahwa pihaknya masih menimbang untuk mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

"Praperadilan masih akan dibicarakan dengan keluarga," katanya dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Senin.

Dia mengakui masih terlalu dini untuk memutuskan mengajukan gugatan praperadilan.

"Ini, 'kan, baru satu hari," ujarnya.

Pada Kamis (5/9), Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Nadiem Makarim selaku mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Nurcahyo Jungkung Madyo mengatakan bahwa pada tahun 2020, Nadiem selaku Mendikbud saat itu bertemu pihak dari Google Indonesia.

Pertemuan itu dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, salah satunya

adalah program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian, terutama kepada peserta didik.

Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan Nadiem Makarim dengan pihak Google Indonesia, telah disepakati bahwa produk dari Google, yaitu Chrome OS dan Chrome Devices Management (CDM) akan dibuat proyek pengadaan alat TIK.

Kemudian, dilaksanakan rapat tertutup guna membahas pengadaan dengan menggunakan Chromebook. Padahal, pada saat itu, pengadaan alat TIK belum dimulai.

Untuk meloloskan Chromebook, pada awal tahun 2020, Nadiem Makarim selaku menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbudristek.

Padahal, sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh Menteri Pendidikan sebelumnya, Muhadjir Effendy.

"(Muhadjir Effendy) tidak merespons karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk Sekolah Garis Terluar (SGT) atau daerah terluar, tertinggal, terdepan (3T)," kata Nurcahyo.

Lalu, atas perintah Nadiem soal pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, tersangka SW (Sri Wahyuningsih) selaku Direktur PAUD dan tersangka MUL (Mulyatsyah) selaku Direktur SMP Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020-2021, membuat petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan yang spesifikasinya sudah mengunci (Chrome OS).

"Selanjutnya, tim teknis membuat kajian review teknis yang dijadikan spesifikasi teknis dengan menyebut Chrome OS," imbuh Nurcahyo.

Akhirnya, Nadiem Makarim pada bulan Februari 2021 menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS.

Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan alat TIK tersebut diperkirakan sekitar Rp1,98 triliun yang saat ini masih dalam penghitungan lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (ANT/KN)



Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri saat menyerahkan ijazah bagi lulusan PKBM Putri Karang Melenu (Ady/MKG)

PEMKAB KUKAR DORONG PENDIDIKAN KESETARAAN, BUPATI SERAHKAN 102 IJAZAH DI PKBM PITRI KARANG MELENU

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat komitmennya dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tak hanya melalui jalur pendidikan formal, Pemkab juga memberi perhatian besar terhadap pendidikan non-formal bagi warga yang sempat putus sekolah.

Komitmen tersebut tampak dalam kunjungan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Putri Karang Melenu di Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu. Dalam kesempatan itu, ia menyerahkan 102 ijazah kepada peserta didik yang dinyatakan lulus program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C.

Bupati Aulia menegaskan, program kesetaraan merupakan

wujud nyata dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara PKBM dengan pihak swasta menjadi model ideal dalam memperkuat layanan pendidikan di Kukar.

“Melalui kerja sama dengan badan usaha, PKBM dapat beroperasi lebih optimal. Masyarakat pun terbantu untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus terkendala biaya,” ujarnya.

PKBM Putri Karang Melenu sendiri sejak 2019 telah menjalin kerja sama dengan PT Multi Harapan Utama (MHU). Dukungan perusahaan ini memungkinkan PKBM meluluskan total 971 peserta didik hingga tahun ini.

Tak hanya itu, PKBM bersama PT MHU juga menghadirkan inovasi berupa tambahan kompe-

tensi bagi peserta didik. Upaya ini bertujuan agar lulusan kesetaraan tidak hanya mengantongi ijazah, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang bisa memudahkan akses ke dunia kerja.

Bupati Aulia menyebutkan, model kerja sama semacam ini layak ditiru oleh badan usaha lain di Kukar. Selain mendukung program Kukar Idaman Terbaik, langkah tersebut juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas SDM di wilayah sekitar.

“Ini contoh nyata bahwa dunia usaha bisa berperan langsung dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Harapannya, semakin banyak perusahaan yang ikut serta dalam program serupa,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor:



Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri saat memulai gerakan minum susu (Ady/MKG)

BUPATI KUKAR AULIA BASRI LUNCURKAN GERAKAN MINUM SUSU, WUJUDKAN PROGRAM MBG PLUS

TENGGARONG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Plus yang digagas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai diimplementasikan secara bertahap. Salah satunya diwujudkan melalui gerakan minum susu di Taman Kanak-kanak (TK) Kebangsaan, Kecamatan Loa Kulu.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, saat menyerahkan 102 ijazah kepada peserta didik yang lulus program kesetaraan Paket A, B, dan C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Putri Karang Melenu, pada Senin (8/9/2025).

Dalam kesempatan itu, Bupati

Aulia tampak membaur bersama para pelajar TK. Ia memulai gerakan minum susu yang disambut antusias oleh anak-anak. Dengan penuh semangat, mereka mengikuti ajakan bupati untuk menikmati susu bersama.

Aulia menegaskan, gerakan minum susu merupakan langkah nyata dalam mendukung visi Kukar Idaman Terbaik melalui program MBG Plus. Program ini tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga lansia, dengan tujuan memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi.

“Ketika gizi anak-anak terpenuhi, otomatis kualitas kecerdasan mereka juga akan meningkat. Inilah yang kita harapkan melalui MBG Plus,” ujarnya.

Menurutnya, pemenuhan gizi sejak usia dini menjadi kunci dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan agar program ini dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dengan gerakan sederhana seperti minum susu bersama, Pemkab Kukar berharap tumbuh kesadaran kolektif tentang pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. “Kedepan program ini (MBG Plus) akan kita mulai gulirkan secara bertahap, baik itu untuk balita maupun lansia,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor :